

# SOSIALISASI POLITIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI KABUPATEN LOMBOK TIMUR BAGI PEMILIH PEMULA MENUJU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

M. Zuliawan Rizkicaputra  
NPP. 31.0747

Asdaf Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email : [wandoreskuyyy@gmail.com](mailto:wandoreskuyyy@gmail.com)

Pembimbing Skripsi : Dr. Baharuddin Thahir, S.Sos, M.Si

## ABSTRACT

**Problem (Gap):** increasing the number of first-time voters in 2024 could be a challenge or opportunity for every political actor contesting in the democratic party. However, what is more important than all of that is how to ensure that the election process can run smoothly. Even though there is a significant increase in first-time voters, this can be overcome to support the electoral process. One way that can be done to overcome this is through political education, namely providing understanding to the public about the importance of democracy and political participation. **Purpose:** To find out about Bakesbangpoldagri's political outreach for novice voters in East Lombok Regency. **Methods:** this research is qualitative research using descriptive methods and data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation obtained from primary and secondary data sources. **Results/ findings:** political socialization carried out by Bakesbangpoldagri can be said to be quite successful. This is in line with what was said by the Chairman of the NTB General Election Supervisory Agency (Bawaslu), Itratip, S.T., M.T., where he said that Millennials and Gen Z dominate the general election in the 2024 elections, even in the regional elections which will take place in November 2024. He further said that almost 60% of voters in the elections on February 14 2024 were Millennials and Gen Z. **Conclusion:** Looking at the participation of first-time voters in East Lombok Regency and what was conveyed by informants, it seems that this socialization activity went smoothly. Even though there were several obstacles, they did not really affect the course of socialization. In other words, socialization can run smoothly and the material to be conveyed can be conveyed well to the target participants.

**Keywords:** Political Socialization, New Voters, General Election

## ABSTRAK

**Permasalahan (Gap):** fenomena peningkatan jumlah pemilih pemula pada tahun 2024 bisa saja menjadi tantangan ataupun peluang bagi tiap aktor politik yang berkontestasi dalam pesta demokrasi. Namun hal yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana caranya agar proses pemilu dapat berjalan dengan lancar. Meskipun ada peningkatan yang signifikan dari pemilih pemula itu dapat teratasi untuk mendukung jalannya proses pemilu. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pendidikan politik, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan partisipasi politik. **Tujuan:** mengetahui sosialisasi politik Bakesbangpoldagri bagi pemilih pemula di Kabupaten Lombok Timur. **Metode:** penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif dan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang di dapat dari sumber data primer dan sekunder. **Hasil/ temuan:** sosialisasi politik yang dilakukan oleh Bakesbangpoldagri dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB, Itratip, S.T., M.T., dimana ia menyebut bahwa Milenial dan Gen Z mendominasi pemilihan umum pada pemilu 2024, bahkan pada pilkada yang akan berlangsung pada bulan November 2024 nanti. Selanjutnya ia mengatakan bahwa hampir 60% pemilih dalam pemilu pada 14 Februari 2024 lalu merupakan generasi Milenial dan Gen Z. **Kesimpulan:** Melihat bagaimana partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Lombok Timur dan apa yang disampaikan oleh Informan, nampaknya kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar. Meskipun ada beberapa kendala, namun tidak terlalu mempengaruhi jalannya sosialisasi. Dengan kata lain sosialisasi dapat berjalan lancar dan materi yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik pada para peserta yang menjadi sasaran.

**Kata Kunci:** Sosialisasi Politik, Pemilih Pemula, Pemilihan Umum

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi. Hal ini dijelaskan di dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia ialah negara yang berkedaulatan rakyat. Kemudian, selanjutnya ditegaskan kembali dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwasanya negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kedaulatan rakyat dan pada pelaksanaannya sudah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni dua kata “demos” dan “kratos”. “demos” memiliki arti yaitu “rakyat” dan “kratos” yang

berarti “kekuatan” atau “kekuasaan”. Jika kedua kata tersebut digabungkan maka akan memiliki makna demokrasi yaitu pemerintahan yang berkedaulatan rakyat.

Namun dalam mendefinisikan demokrasi, tidak ada definisi tunggal dari demokrasi. Demokrasi dapat memiliki beda-beda pengertian karena bergantung kepada siapa yang mengartikan serta bagaimana demokrasi itu didefinisikan (Oktaviani & Yumitro, 2022:57). Maka dari itu implementasi demokrasi yang ada pada setiap negara selalu memiliki perbedaan. Adapun demokrasi menurut Henry Mayo, yaitu kebijakan umum ditentukan atas kepentingan mayoritas berdasarkan hasil pemilu yang bebas serta mengedepankan prinsip persamaan politik (Putri, 2020:45). Demokrasi dan pemilihan umum adalah 2 kata yang memiliki keterkaitan dan tak bisa dipisahkan. Pemilihan umum adalah sarana untuk mendelegasikan kekuasaan kepada rakyat seperti memilih pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan roda pemerintahan. Adapun mekanisme ini digunakan untuk mendelegasikan atau memberikan kekuasaan kepada individu atau partai yang telah diberi kepercayaan (Surbakti, 1992:125). Menurut Betty Epsilon Idroos, anggota KPU saat menjadi keynote speaker MAW Talk Outlook 2024, dalam artikel online pada website kpu.go.id terdapat 3 Indikator pemilihan umum yang demokratis. “Pemilu yang demokratis ditandai oleh tiga hal yakni: politik partisipasi, pemilu inklusif dan adanya representasi lembaga demokrasi.”

Partisipasi politik dari warga negara dalam pemilihan umum merupakan salah satu indikator penting terhadap pelaksanaan demokrasi yang berkedaulatan rakyat, baik pemilihan umum kepala daerah, presiden, ataupun pemilihan umum legislatif merupakan salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan penyelenggaraan demokrasi di suatu negara. Tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi menunjukkan kesadaran masyarakat yang besar terhadap kegiatan kenegaraan. Sebaliknya, jika partisipasi politik yang rendah itu menunjukkan bahwa ada masalah yang menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan tidak peduli terhadap kegiatan kenegaraan (Budiardjo, 2000:367).

Seiring berjalannya kehidupan bermasyarakat pada saat ini, pemahaman mengenai demokrasi merupakan elemen penting sebagai pemahaman dasar untuk dapat berpartisipasi dan mengambil peran pada jalannya pemerintahan. Oleh sebab itu, pemerintah sebagai penyelenggara harus mampu memberikan sosialisasi yang baik sehingga setiap warga negara dapat ikut serta dalam partisipasi politik. Pemerintah



sebagai pemegang mandat rakyat, diamanahkan hak dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya. Hak dan kewenangan bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya daerah, demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Teorell dkk. (2007:23) partisipasi warga negara dalam politik meliputi memberikan suara dalam pemilihan umum/pemilihan kepala daerah, mengirimkan surat/pesan kepada pemerintah, berpartisipasi dalam kegiatan demonstrasi, bergabung kedalam partai politik, bergabung dengan organisasi sosial, melamar jabatan publik, menyumbang kepada partai atau politisi, dan berpartisipasi dalam acara penggalangan dana. Masyarakat yang tidak memiliki pendidikan politik yang memadai akan mudah terpengaruh oleh informasi yang salah dan terjebak pada pandangan yang keliru. Sebab pada saat ini, berita sangat mudah disebarkan melalui media internet atau media sosial yang belum diketahui validitas kebenaran dari berita tersebut yang berpotensi menjadi pemberitaan tidak benar (hoax) sekalipun. Hal ini tentu memiliki pengaruh yang kuat kepada masyarakat Indonesia (Morrison, 2016:52).

Pada tingkat daerah, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan politik, guna meningkatkan kualitas demokrasi di wilayahnya. Akan tetapi, pada era otonomi daerah saat ini masih marak terjadi persaingan dan konflik politik yang menunjukkan minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan politik di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan dan tanggung jawab pemerintah, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Hal seperti di atas pun juga terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Di samping pemilu 2024 diadakan serentak pada setiap daerah, fenomena peningkatan pemilih pemula juga menjadi tantangan ataupun peluang baru bagi setiap aktor politik yang berkontestasi dalam pesta demokrasi.

Jumlah dari pemilih pemula yang besar dapat menyebabkan beberapa partai politik menjadikan pemilih pemula sebagai target utama. Terlebih lagi, pemilih pemula belum memiliki orientasi politik yang jelas sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. Tabel 2.1 di bawah selanjutnya menunjukkan komposisi penduduk di Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2021.

Tabel 1. 1

## Komposisi Penduduk Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021

Kelompok usia (tahun)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
0-4	104.800	8,3
5-9	101.545	7,9
10-14	81.291	6,4
15-19	108.686	8,5
20-24	115.314	9,1
25-29	122.237	9,7
30-34	129.802	10,3
35-39	122.089	9,7
40-44	106.206	8,3
45-49	88.991	7,1
50-54	68.185	5,4
55-59	51.767	4
60-64	35.613	2,8

Sumber: Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka, BPS, 2021

Hal inilah yang menyebabkan perlunya sosialisasi politik dilakukan demi kelancaran proses demokrasi serta peningkatan pengetahuan akan politik bagi pemilih pemula. Sosialisasi politik merupakan aspek penting dalam aktivitas politik karena merangsang minat individu atau kelompok untuk berpartisipasi di suatu sistem sehingga dapat ikut serta dalam melaksanakan aktivitas politik. Greenstein dalam Althoff (2008:14) menjelaskan definisi sosialisasi politik dalam artian sempit dan luas. Sosialisasi politik secara sempit merupakan upaya menanamkan informasi, nilai, dan praktik pada masyarakat yang dilakukan secara sengaja oleh lembaga atau badan diberi wewenang untuk melakukannya secara formal dalam kerangka tugas dan tanggung jawab. Secara luas, sosialisasi politik adalah identifikasi segala upaya dan usaha yang dilakukan untuk mempelajari sekaligus mengajarkan hal-hal yang belum diketahui oleh masyarakat baik secara informal maupun formal, secara sengaja ataupun tidak dalam siklus kehidupan yang didalamnya memiliki tujuan pembelajaran agar masyarakat menjadi tahu.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 dijelaskan bahwa pendidikan politik juga difasilitasi untuk menuju tujuan dan sarasannya. Dalam Pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa kelompok sasaran fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik meliputi:

- a. partai politik;
- b. partai politik lokal;
- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. lembaga nirlaba lainnya; dan
- e. lembaga atau instansi vertikal di daerah.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (1) dimana kelompok sasaran fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat melakukan konsultasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri. Artinya disini Baksbangpol memiliki tugas yang beririsan langsung dengan pendidikan politik. Di samping itu, salah satu tujuan dari Bakesbangpoldagri adalah “pemeriksaan dan pemantauan penilaian persatuan dan kesatuan bangsa, pembauran pengetahuan kebangsaan, politik, demokrasi, kerukunan umat Beragama serta ketahanan bidang ekonomi dan seni budaya.” Dengan begini Bakesbangpoldagri memiliki peranan yang sangat signifikan dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat agar proses demokrasi khususnya pemilu dapat berjalan dengan lancar.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Fenomena peningkatan jumlah pemilih pemula pada tahun 2024 bisa saja menjadi tantangan ataupun peluang bagi tiap aktor politik yang berkontestasi dalam pesta demokrasi. Namun hal yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana caranya agar proses pemilu dapat berjalan dengan lancar. Meskipun ada peningkatan yang signifikan dari pemilih pemula itu dapat teratasi untuk mendukung jalannya proses pemilu. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan pendidikan politik, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya demokrasi dan partisipasi politik. Hal inilah yang dalam ini akan dibahas mengenai cara dari Bakesbangpoldagri memberikan pendidikan politik bagi pemilih pemula dengan melakukan sosialisasi politik.



### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu pertama yang dijadikan acuan ditulis oleh Djuyandi (2014) dengan judul “Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum”. Hasil pembahasan menjelaskan pentingnya sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU.

Penelitian kedua ditulis oleh Hakim (2021) dengan judul “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”, merupakan penelitian yang bersifat kualitatif menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan induktif. Pembahasan menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten Tebo dan faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan salah satu fungsinya yaitu memberikan masyarakat pendidikan politik.

Penelitian ketiga, yakni “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam Mewujudkan Partisipasi Politik yang Cerdas dan Berintegritas Tahun 2018”. Penelitian ini ditulis oleh Deswanda (2020) menunjukkan peran pemerintah yang merupakan pionir dalam program sosialisasi, telah terlaksana dengan baik. Pemerintah berusaha menurunkan angka golput di kalangan masyarakat umum di Kabupaten Bengkalis dengan cara memaksimalkan dan mengoptimalkan aset yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan memperluas anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Deswanda menyebut faktor yang menjadi penghambat yaitu sumber daya manusia yang masih kurang berkualitas, minimnya sarana prasarana, dan kurangnya optimalisasi anggaran.

Penelitian keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Cherlinda Hestiane Cahyani pada tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan sosialisasi politik Kesbangpol berpengaruh signifikan terhadap partisipasi pemilih pemula di Depok yaitu sebesar 43,6%. Menurut para peserta sosialisasi, Kesbangpol telah melakukan sosialisasi dengan sangat baik dan dilakukan dengan perencanaan yang matang.

Penelitian yang terakhir adalah skripsi yang ditulis oleh Syarief Hidayat (2021). Dimana penelitian ini membahas bagaimana partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik pemilih pemula di Desa Lubuk Lancang mengalami peningkatan. Adapun bentuk kegiatan politik yang dilakukan oleh pemilih pemula di Desa Lubuk Lancang berupa pemungutan suara

(*voting*), kampanye, anggota administratif atau panitia pengawas pemilu dan demonstrasi. Berdasarkan keaktifan dan kegiatannya maka dapat dikategorikan dalam jenis partisipasi politik spectator, partisipasi politik gladiator, dan partisipasi politik pengkritik.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Beberapa penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini. Dari beberapa penelitian sebelumnya yang dijelaskan di atas, salah satu hal yang menjadi perbedaan yang signifikan dengan penelitian ini adalah bagaimana penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana proses berjalannya sosialisasi secara langsung. Artinya tulisan ini lebih banyak berbicara mengenai fakta yang ada di lapangan yang kemudian dibuat menjadi tulisan ilmiah dan disesuaikan dengan teori yang ada sesuai dengan kapabilitas penulis sebagai sarjana terapan ilmu pemerintahan.

#### **1.5 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian adalah mengetahui sosialisasi politik Bakesbangpoldagri bagi pemilih pemula di Kabupaten Lombok Timur, mengetahui materi dan penyampaian materi dalam sosialisasi politik oleh Bakesbangpoldagri Lombok Timur pada pemilih pemula serta melihat bagaimana tingkat partisipasi pemilih pemula Lombok Timur dalam pemilu 2024 pasca sosialisasi politik oleh Bakesbangpoldagri.

### **II. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yang memiliki keterkaitan dan dapat mempermudah pelaksanaan penelitian karena penelitian merupakan karya ilmiah yang dalam penulisannya terkandung nilai-nilai estetika. Dalam pengumpulan data, penulis pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi (*taking notes*). Untuk analisis data penulis memulai dengan proses mencatat hal-hal yang ada di lapangan, lalu memahami dan merangkum data-data yang sudah didapatkan sebelumnya agar dapat dilihat garis besarnya dan selanjutnya dapat disajikan menjadi sebuah data yang mendukung suatu penelitian.

### **III. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Pemilu 2024**



Pemilihan Umum (Pemilu) termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada/ pemilihan) secara langsung oleh rakyat adalah suatu sarana yang mengejawantahkan kedaulatan rakyat demi menghasilkan sebuah pemerintahan yang demokratis – khususnya di Indonesia – yakni pemilu yang demokratis dan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu pada tahun 2019 lalu merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan secara serentak yang menggabungkan pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD, dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu tersebut dilaksanakan dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). UU Pemilu ini menyederhanakan dan menyelaraskan beberapa pengaturan pemilu sebelumnya yakni UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Pengaturan ini pula lah yang menjadi landasan bagi dilaksanakannya pemilu serentak di tahun 2024 (Tim Perludem, 2023).

Mengenai model pemilihan umum serentak yang diatur pada UU Pemilu dan dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pilpres dan pemilihan anggota lembaga perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki adanya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas. Sejalan dengan itu, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan tiga kali perubahannya (UU Pilkada) masih tetap berlaku dalam Pemilihan Tahun 2024.

Dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada disebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”. Dengan kata lain, ini akan menyebabkan irisan tahapan antara pemilu dan pilkada pada tahun 2024, dimana seiring dengan berjalannya tahapan pemilu, di suatu titik tahapan pemilu juga akan dimulai tahapan pilkada. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

### **3.2 Peserta Sosialisasi**

Dalam program ini, Bakesbangpoldagri mengusahakan bagaimana menyamaratakan kesempatan di tiap-tiap sekolah untuk mendapatkan pendidikan politik. Sosialisasi politik yang rutin dilaksanakan oleh Bakesbangpoldagri ini adalah langkah besar pemerintah daerah dalam menanamkan ideologi dan membangun pemahaman politik kepada masyarakat khususnya pemilih pemula. Dalam hal ini, peserta sosialisasi yakni pemilih pemula berada pada tahap kedua yaitu sosialisasi yang ditujukan pada pemuda yang memasuki usia dewasa, dimana ini menunjukkan intensitas relasi dengan kelompok pergaulan yang sangat tinggi.

Pada tahap ini, bentuk sosialisasi yang didapatkan dengan pengembangan emosional dalam memperoleh pengetahuan tentang lembaga-lembaga politik. Dimana kelompok pergaulan menjadi salah satu pihak yang melakukan sosialisasi berkedudukan sama dengan target sasaran karena pertemanan dalam pergaulan ini akan saling betukar informasi yang diperolehnya terkait isu-isu mengenai politik ataupun pembahasan yang berkaitan dengan politik lainnya.

### **3.3 Tema dan Materi Pembahasan dalam Sosialisasi Politik**

Pada pelaksanaan evaluasi yang telah dilakukan, Bakesbangpoldagri merumuskan materi pembahasan yang akan diberikan berdasarkan pelaksanaan program pelatihan yang sebelumnya telah dilakukan dan juga telah menyinggung beberapa bahasan sebelumnya. Pada beberapa materi Bakesbangpoldagri memfokuskan materi untuk memberdayakan masyarakat dalam mengoperasionalkan informasi tentang pengetahuan sistem negara, prinsip dasar negara, serta prinsip berkehidupan dalam berbangsa dan bernegara yang baik.

Tema besar yang diusungkan oleh Bakesbangpoldagri dalam sosialisasi politik ini adalah “*Literasi Politik Generasi Milenial Menuju Sukses Pemilu 2024 Untuk Indonesia Maju*”. Dalam tema tersebut ada beberapa hal yang sangat signifikan dalam menunjang pengetahuan politik bagi pemilih pemula di Lombok Timur yaitu:

1. Menjelaskan apa itu Pemilu secara umum
2. Sosialisasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD I, DPRD II, dan DPD.
3. Tantangan dalam pemilu
4. Pendidikan mengenai wawasan kebangsaan, Pancasila, UUD 1945 dan Bhineka Tunggal Ika untuk pemuda bangsa.



Tema besar yang sudah disebutkan sebelumnya memiliki fokus dan bahasan yang berbeda mulai dari pengenalan sistem negara dan ketatanegaraan, hak-hak politik rakyat, partai politik dan pemilu. Bisa dilihat bahwasannya kurikulum tersebut merupakan perumusan yang dibentuk untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Melalui kerangka dasar yang telah dirumuskan yaitu mengenal, memahami, dan mengimplementasikan wawasan politik yang diperoleh pada sosialisasi yang diberikan.

Terkhusus untuk sosialisasi pemilih pemula pada tahun 2018, memang dipersiapkan untuk menghadapi pemilu baik itu pemilihan gubernur tahun 2018 dan pemilihan presiden untuk tahun 2019. Karenanya isi dari sosialisasi politik cenderung dan lebih banyak membahas tentang demokrasi, partai politik, pemilu, tahapan pemilu, dan simulasi pencoblosan. Untuk lebih detailnya, berikut ini adalah kurikulum pembahasan yang digunakan dalam sosialisasi politik.

### **3.4 Partisipasi Pemilih Pemula dalam Pemilu 2024**

Pada pelaksanaan Pemilu 2024 ada hal yang menjadi penting untuk diperhatikan. Hal tersebut adalah bagaimana tingginya angka pemilih muda di Indonesia. Dari 204 juta lebih pemilih Indonesia pada Pemilu 2024, lebih dari 50% adalah pemilih usia muda. Dalam data yang dirilis oleh KPU, menunjukkan bahwa konfigurasi usia pemilih untuk Pemilu 2024 dikuasai oleh pemilih muda. Ruang lingkup pemilih muda dalam hal ini adalah pemilih yang memiliki usia di bawah 40 tahun. Dalam data yang telah ditetapkan oleh KPU, terdapat total pemilih yang memiliki usia di bawah 40 tahun jumlahnya adalah 48,07%. Dalam 48,07% tersebut pemilih yang berusia 31-40 tahun berjumlah 20,70% dan yang berusia 17-30 tahun terdapat sebanyak 31,23%.

Hal yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah bagaimana pemilih pemula yang baru akan melakukan pemilihan untuk pertama kalinya dimana kebanyakan cenderung belum memiliki kesadaran politik yang tinggi bahkan tidak mengikuti perkembangan politik. Pada gilirannya, banyak dari pemilih pemula yang memberikan hak suaranya dengan hanya mengikuti arahan dari orang yang lebih tua atau berpengalaman, atau bahkan tidak memilih sama sekali (golongan putih). Dengan begini pendidikan politik sangat perlu dilakukan agar hal-hal sedemikian rupa dapat diantisipasi. Pentingnya pendidikan politik bagi pemilih pemula selain demi berjalan lancarnya proses demokrasi, pemilih pemula juga harus mulai menyadari bahwa sudah saatnya untuk menjadi bagian yang bertanggung jawab terhadap negara (Astreawan, 2022).



Menurut data Komisi Pemilihan Umum (KPU) (2023), dari 204,8 juta pemilih di tahun 2024, sebesar 25 juta adalah pemilih pemula (usia 17-25 tahun) (KPPPA, 2024). Tingginya angka pemilih pemula ini memunculkan pro dan kontra khususnya terkait peluang dan hambatan akan tingginya angka pemilih pemula.

Dari sejumlah riset yang ada, salah satu yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia (2021) menunjukkan bahwa pandangan dari anak muda terhadap politik cenderung pesimis. Artinya ini merupakan sebuah permasalahan yang harus segera ditangani. Tingginya angka pemilih pemula ini sebenarnya terjadi di seluruh Indonesia dan termasuk di Kabupaten Lombok Timur.

Tabel 4.4  
Komposisi Penduduk Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021

Kelompok usia (tahun)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
0-4	104.800	8,3
5-9	101.545	7,9
10-14	81.291	6,4
15-19	108.686	8,5
20-24	115.314	9,1
25-29	122.237	9,7
30-34	129.802	10,3
35-39	122.089	9,7
40-44	106.206	8,3
45-49	88.991	7,1
50-54	68.185	5,4
55-59	51.767	4
60-64	35.613	2,8

Sumber: Kabupaten Lombok Timur Dalam Angka, BPS, 2021

Dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa 17,6% dari penduduk di Kabupaten Lombok Timur merupakan pemilih muda. Artinya dari 17,6% ini sebagian besarnya diharapkan akan turut berpartisipasi dalam pemilu 2024. Melihat hal ini

Bakesbangpoldagri selaku badan pemerintahan yang bertugas untuk pembauran pengetahuan kebangsaan, politik, dan demokrasi melakukan sebuah sosialisasi politik untuk memberi pengetahuan politik pada pemilih pemula menuju pemilu 2024. Dengan begini Bakesbangpoldagri memiliki peranan yang sangat signifikan dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat agar proses demokrasi khususnya pemilu dapat berjalan dengan lancar.

Sosialisasi politik ini dilakukan demi kelancaran proses demokrasi serta peningkatan pengetahuan akan politik bagi pemilih pemula. Sosialisasi politik merupakan aspek penting dalam aktivitas politik karena merangsang minat individu atau kelompok untuk berpartisipasi di suatu sistem sehingga dapat ikut serta dalam melaksanakan aktivitas politik.

Melihat data yang ada, nampaknya sosialisasi politik yang dilakukan oleh Bakesbangpoldagri dapat dikatakan cukup berhasil. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB, Itratip, S.T., M.T., dimana ia menyebut bahwa Milenial dan Gen Z mendominasi pemilihan umum pada pemilu 2024, bahkan pada pilkada yang akan berlangsung pada bulan November 2024 nanti. Selanjutnya ia mengatakan bahwa hampir 60% pemilih dalam pemilu pada 14 Februari 2024 lalu merupakan generasi Milenial dan Gen Z.

Selain itu, Ketua Bawaslu NTB tersebut juga memaparkan bahwa rata-rata pemilih di Kabupaten/ Kota data pemuda yang berpartisipasi berada di atas 50%. Menurut data KPU NTB, jumlah pemilih Milenial dan Gen Z pada pemilu 14 Februari lalu mencapai angka 58,62%. 1.396.841 pemilih atau 35,61% merupakan Milenial, dan 899.840 pemilih atau 22,97% merupakan Gen Z (Suara NTB, 2024).

### **3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Djuyandi (2014) dengan judul “Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum”. Hasil pembahasan menjelaskan pentingnya sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU. Sosialisasi oleh KPU tidak serta hanya berisi imbauan kepada masyarakat untuk menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS), tetapi disertai dengan ajakan kepada masyarakat untuk menjaga kondisi, situasi ketentraman, serta kelancaran dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2014. Target KPU mencapai persentase 75% partisipan, dan menurut perhitungan akhir yang dilakukan oleh KPU mencapai angka 75,11%. Dapat disimpulkan Komisi Pemilihan Umum (KPU)

telah berhasil melampaui target mereka dan berhasil menekan angka jumlah golput pada pemilihan umum tahun 2014. Hal ini menunjukkan bahwa KPU telah melaksanakan sosialisasi politik secara efektif. Mengenai perbedaannya dengan penelitian ini adalah objek dari penelitian yang ada dimana Djuyandi 2014 melihat bagaimana efektivitas sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU, sedangkan penelitian ini melihat bagaimana Bakesbangpoldagri dalam melakukan sosialisasi politik. Dengan perbedaan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing badan, tentu menghasilkan perbedaan dalam bagaimana penelitian dilakukan serta hasil yang ada.

Untuk penelitian milik Hakim (2021) dengan judul “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”, Pembahasan menjelaskan tentang bentuk pertanggungjawaban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan pendidikan politik bagi masyarakat Kabupaten Tebo dan faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan salah satu fungsinya yaitu memberikan masyarakat pendidikan politik. Adapun penelitian tersebut menyebut faktor penghambat program pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu jumlah anggaran yang kecil dan sikap masyarakat yang sebagian besar masih apatis terhadap pemilu. Pada penelitian tersebut juga memang menjelaskan bagaimana Bakesbangpol dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberi pendidikan politik. Tetapi perbedaannya terletak pada pendidikan yang dilakukan oleh Bakesbangpol pada penelitian tersebut dilakukan secara *general*. Berbeda halnya dengan penelitian ini yang fokus membahas bagaimana Bakesbangpoldagri Lombok Timur memberi sosialisasi politik pada pemilih pemula dalam rangka menuju pemilu.

Selanjutnya penelitian dengan judul “Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam Mewujudkan Partisipasi Politik yang Cerdas dan Berintegritas Tahun 2018” yang ditulis oleh Deswanda (2020). Penelitian ini menunjukkan peran pemerintah yang merupakan pionir dalam program sosialisasi, telah terlaksana dengan baik. Pemerintah berusaha menurunkan angka golput di kalangan masyarakat umum di Kabupaten Bengkalis dengan cara memaksimalkan dan mengoptimalkan aset yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan memperluas anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Dalam penelitian ini lebih banyak melihat bagaimana Bakesbangpol Bengkalis mengalokasikan serta



mengorganisir sumber daya yang dimiliki dalam meningkatkan partisipasi politik. Sedangkan penelitian ini jelas hanya membahas bagaimana sosialisasi politik yang dilakukan oleh Bakesbangpoldagri Lombok Timur sehingga berpengaruh pada partisipasi pemilu pemilih pemula di tahun 2024.

Kemudian Cherlinda Hestiane Cahyani pada tahun 2019. Penelitian ini memang hampir mirip dengan apa yang akan ada dalam penelitian ini namun lokasi dan waktu yang berbeda membuat adanya perbedaan hambatan dan solusi yang harus diberikan oleh Bakesbangpoldagri selaku agen sosialisasi politik untuk diatasi. Oleh karena itu, metode maupun penyampaian materi yang ada pun akan berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian yang terakhir adalah skripsi yang ditulis oleh Syarief Hidayat (2021). Dimana penelitian ini membahas bagaimana partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu. Meskipun adanya kesamaan dalam membahas pemilih pemula dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, tetapi fakta bahwa adanya perbedaan antara sosialisasi dan partisipasi menjadikan penelitian ini akan menelaah bagaimana sosialisasi politik yang dilakukan oleh Bakesbangpoldagri pada pemilih pemula. Dimana sebelum pembahasan partisipasi politik dilakukan, salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkannya adalah dengan cara melakukan sosialisasi politik yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **IV. Kesimpulan**

Melihat bagaimana partisipasi pemilih pemula di Kabupaten Lombok Timur dan apa yang disampaikan oleh Informan, nampaknya kegiatan sosialisasi ini berjalan dengan lancar. Meskipun ada beberapa kendala, namun tidak terlalu mempengaruhi jalannya sosialisasi. Dengan kata lain sosialisasi dapat berjalan lancar dan materi yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik pada para peserta yang menjadi sasaran. Dalam penelitian yang bersandar pada teori sosialisasi politik ini, setidaknya ada tiga hal yang dapat disimpulkan:

- 1) Bakesbangpoldagri Kabupaten Lombok Timur merupakan agen sosialisasi politik yang melakukan pendidikan politik langsung pada pemilih pemula menuju pemilihan umum tahun 2024 untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

- 2) Secara singkat, pembahasan dan materi yang diberikan oleh Bakesbangpoldagri merupakan pembahasan yang lebih menekankan pada mensosialisasikan apa dan bagaimana pemilu dilakukan secara umum, mengingat sasaran dari kegiatan ini adalah para pemilih pemula.
- 3) Dari sosialisasi politik pada pemilih pemula ini, dapat dikatakan berhasil melihat tingginya angka partisipasi pemula pada Gen Z dan Mienial dalam pemilu 2024 yang lalu di Lombok Timur.
- 4) Memang hal ini bukan menjadi satu-satunya faktor penentu dalam tingginya angka tersebut, tetapi di sisi lain sosialisasi politik ini dapat dikatakan menjadi faktor pendukung dari tingginya angka pemilih pemula di Lombok Timur. Dengan kata lain, sosialisasi ini dapat dikatakan berhasil.

#### **V. Ucapan Terima Kasih**

Penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan sebesar besarnya kepada Bakesbangpoldagri Kabupaten Lombok Timur, seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

#### **VI. Daftar Pustaka**

##### **Buku dan Jurnal**

- Althoff, M. Rush. P. 2008. *Pengantar Sosiologi Politik*. Diterjemahkan oleh Kartini Kartono. Jakarta: Scholar UNAND.
- Astreawan, I. G. (2022, July 14). Peran Pemilih Pemula Dalam Pemilu 2024. KPU. Retrieved June 23, 2024, from <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10700/peran-pemilih-pemula-dalam-pemilu-2024>
- Budiardjo, M. 2000. *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Cahyani, C. H. (2019). *SOSIALISASI POLITIK DAN PARTISIPASI POLITIK: Peran Kesbangpol terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula di Kota Depok Tahun 2018* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49177/1/CHERLINDA%20HESTIANE%20CAHYANI.FISIP.pdf>
- Deswanda, I., & Wicaksono, B. 2020. *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis dalam Mewujudkan Partisipasi Politik yang Cerdas dan Berintegritas Tahun 2018*, Vol. 7. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Djuyandi, Y. 2014. *Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 oleh Komisi Pemilihan Umum 2014*.

- Greenstein, F. (1965). Personality and Political Socialization: The Theories of Authoritarian and Democratic Character. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, 361(1). <https://doi.org/10.1177/000271626536100108>
- Hakim, J. 2021. *Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Meningkatkan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi*.
- Hidayat, S. (2021). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Lubuk Lancang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. <https://repository.radenfatah.ac.id/9622/1/SYARIEF%20HIDAYAT.pdf>
- Indikator Politik Indonesia. (2021, March 21). Survei Nasional Suara Anak Muda Tentang Isu-Isu Sosial Politik Bangsa. Indikator Politik Indonesia. Retrieved July 9, 2024, from [https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2021/03/Rilis-Survei-Indikator\\_21-Maret-2021.pdf](https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2021/03/Rilis-Survei-Indikator_21-Maret-2021.pdf)
- KPPPA. (2024, February 5). *Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Retrieved June 27, 2024, from <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTA1Nw==>
- Morrison, G. S., & Santoso, Y. 2016. *Pendidikan anak usia dini saat ini*. Jakarta: Indeks.
- Oktaviani, S., & Yumitro, G. (2022). Radikalisme Sebagai Tantangan Demokratisasi Bangladesh. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 14(2), 48–67. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v14i2.5775>
- Putri, S. O. (2020). Demokrasi. *Repository Unikom*, 6–9. <https://repository.unikom.ac.id/64326/1/Demokrasi.pdf>
- Surbakti, R. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Raja Grafindo Persada.
- Teorell, J. Svensson, Dahlberg, M. 2007. *Political Participation: Mapping the Terrain*. Cambridge University Press
- Tim Perludem. (2023). *Handbook Buku Panduan Partisipasi Pemuda pada Pemilu Serentak 2024*. <https://perludem.org/wp-content/uploads/2023/12/Partisipasi-Anak-Muda-pada-Pemilu-Serentak-2024.pdf>
- Suara NTB. (2024, May 25). *Milenial dan Gen Z Dominasi Pilkada*. SUARANTB.com. Retrieved June 27, 2024, from <https://www.suarantb.com/2024/05/25/milenial-dan-gen-z-dominasi-pilkada/>